



***PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2025***



***SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Semoga dengan telah tersusunnya Perubahan RENJA OPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah kegiatan pokok berupa pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kebijakan, dan kegiatan penunjang berupa kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana maupun penyediaan dukungan peralatan dan personil.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya.

Nunukan, 16 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH 



Ir. Jabbar, M.Si

NIP. 196510011997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II HASILEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	43
3.2 Program dan Kegiatan.....	45
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Perubahan Renja Perangkat Daerah juga untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga Pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD.
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD.
3. Substansi perubahan Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Nunukan Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025. Perubahan Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Nunukan. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yaitu Belum Maksimalnya penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah serta fasilitasi bantuan hukum, Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan SDA, Data administrasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis kebijakan pembangunan daerah, belum terintegrasi dan bersifat *realtime*, Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah, Rendahnya kapasitas aparatur perangkat daerah, Masih rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah, Belum maksimalnya proses pengadaan barang/jasa, Masih rendahnya kualitas pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja sekretariat Kabupaten Nunukan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Perubahan RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) yang dilaksanakan tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan II
Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Nunukan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan/ sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Akhir Triwulan I Tahun 2025		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d akhir Triwulan 1 Tahun 2025		Catatan penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6*100	11=9/7*100	12
	SEKRETARIAT DAERAH										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100.00%	196,386,935,735	100.00%		0.00%	16,687,275,169			
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			73,460,260,398				11,984,686,775			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	100.00%	720,735,000	100.00 %	232,099,585	0.00%	3,103,600			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	14 Dokumen	160,735,000	2 Dokumen	38,965,620	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	24,110,300	1	Dokumen	-	100.00%	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	24,999,190	-	Dokumen	-	0.00%	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	24,999,735	1	Dokumen	-	100.00%	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	24,998,400	-	Dokumen	-	0.00%	0.00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	160,000,000	6	Laporan	94,026,340	4	Laporan	3,103,600.00	66.67%	3.30%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100.00 %	%	68,485,324,148	100.00 %	%	935,582,000			11,111,167,832			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/buln	65,630,529,648	120	Orang/buln	15,709,957,338	106	Orang/buln	10,804,242,555	88.33%	68.77%	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3775	Dokumen	2,305,369,500	760	Dokumen	935,582,000	441	Dokumen	306,925,277	58.03%	32.81%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	70	Laporan	549,425,000	14	Laporan	147,882,500	4	Laporan	-	28.57%	0.00%	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95.00%	%	4,254,201,250	100.00 %		1,488,783,179			870,415,343			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	890,089,250	2	orang/bulan	455,227,179	2	orang/bulan	257,470,343	100.00%	56.56%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94	Paket	864,112,000	20	Paket	173,556,000	2	Paket	397,660,000	10.00%	229.12%	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	500,000,000	2	Orang	260,000,000	2	Orang	15,485,000	100.00%	5.96%	

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	2,000,000,000	2 Orang/bulan	600,000,000	2 Orang/bulan	199,800,000	100.00%	33.30%	
BAGIAN UMUM			90,828,198,937				3,864,138,439			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00 %	455,000,000	100.00 %	219,999,015		-			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	119,999,260	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	375,000,000	2 Laporan	99,999,755	1 Laporan	-	50.00%	0.00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.00%	918,750,000	90.00%	29,999,965		-			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	465 Dokumen	120,000,000	120 Dokumen	29,999,965	106 Dokumen	-	88.33%	0.00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	92.00%	12,224,300,940	92.00%	4,681,440,373		967,876,270			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	35	Paket	411,877,500	7	Paket	86,171,400	1	Paket	29,944,470	14.29%	34.75%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40	Paket	1,430,520,600	8	Paket	1,231,824,080	12	Paket	585,391,800	150.00%	47.52%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	40	Paket	1,659,148,940	8	Paket	293,544,958	2	Paket	186,000,000	25.00%	63.36%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	180	Paket	1,609,187,400	36	Paket	335,636,560	2	Paket	2,860,000	5.56%	0.85%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35	Paket	381,631,000	7	Paket	72,050,055	-	Paket	-	0.00%	0.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	290	Laporan	6,235,805,500	58	Laporan	2,574,422,320	10	Laporan	163,680,000	17.24%	6.36%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	40,000	Dokumen	496,130,000	8000	Dokumen	87,791,000	1,41 2	Dokumen	-	17.65%	0.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14	Unit	6,116,688,000	5	Unit	3,404,000,000		Unit	-		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	3,431,468,000	5	Unit	3,404,000,000	-	Unit	-	0.00%	0.00%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	38,606,540,720	95.00%	9,329,962,040		1,971,830,476			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4037 Laporan	266,070,000	800 Laporan	51,250,000	681 Laporan	-	85.13%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	253 Laporan	11,331,097,000	50 Laporan	2,960,454,000	10 Laporan	649,022,581	20.00%	21.92%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	225 Laporan	27,009,373,720	45 Laporan	6,318,258,040	10 Laporan	1,322,807,895	22.22%	20.94%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	21,990,750,177	95.00%	5,330,279,266		407,344,953			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	2,162,958,300	12 Unit	535,628,146	6 Unit	78,342,000	50.00%	14.63%	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84 Unit	5,036,091,000	84 Unit	1,394,598,370	15 Unit	173,264,700	17.86%	12.42%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	220 Unit	8,396,077,300	220 Unit	1,922,691,500	5 Unit	71,560,000	2.27%	3.72%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	6,395,623,577	5 Unit	1,477,361,250	1 Unit	84,178,253	20.00%	5.70%	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95 %	10,516,169,100	95.00%	2,608,729,450		517,086,740			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	100 Paket	5,644,393,350	20 Paket	1,372,781,660	4 Paket	343,365,000	20.00%	25.01%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100 Paket	4,101,333,800	20 Paket	998,274,990	4 Paket	167,000,000	20.00%	16.73%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	140 Paket	770,441,950	28 Paket	237,672,800	Paket	6,721,740	0.00%	2.83%	
BAGIAN ORGANISASI			4,323,129,200				56,018,000			
Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	100.00 %	4,323,129,200	100.00 %	1,666,955,500		56,018,000			

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250 Dokumen	1,107,536,000	50 Dokumen	616,989,250	50 Dokumen	25,500,000	100.00%	4.13%	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	240 Laporan	768,158,600	48 Laporan	299,986,750	- Laporan	25,928,000	0.00%	8.64%	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	48 Dokumen	880,000,000	12 Dokumen	349,988,000	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	145 Dokumen	1,567,434,600	29 Dokumen	399,991,500	29 Dokumen	4,590,000	100.00%	1.15%	
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			27,775,347,200				782,431,955			
	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	95.00% %	27,775,347,200	95.00%	9,829,535,980		782,431,955			
	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	2000 Laporan	15,148,597,800	450 Laporan	6,193,888,250	94 Laporan	763,753,955	20.89%	12.33%	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	950 Laporan	10,740,600,000	210 Laporan	2,885,734,230	94 Laporan	-	44.76%	0.00%	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950 Laporan	1,886,149,400	210 Laporan	749,913,500	129 Laporan	18,678,000	61.43%	2.49%	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100 %	41,981,430,212	100.00 %			2,418,346,564			
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			3,748,811,000				67,613,664			

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	3,362,334,500	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	1,275,149,620		67,613,664			
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35 Dokumen	1,540,276,000	7 Dokumen	743,894,390	2 Dokumen	35,089,050	28.57%	4.72%	
	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	20 Dokumen	1,822,058,500	4 Dokumen	531,255,230	1 Dokumen	32,524,614	25.00%	6.12%	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	90.00% %	386,476,500	90.00%	78,279,120					
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri	20 Dokumen	166,476,500	4 Dokumen	65.180.000	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	49,536,000	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	16 Dokumen	140,000,000	8 Dokumen	28,743,120	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			35,353,752,712				2,332,132,900			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	95.00% %	35,353,752,712	90.00%	13,560,177,300		2,332,132,900			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	212 Dokumen	24,391,036,430	43 Dokumen	10,027,756,800	5 Dokumen	2,291,407,300	11.63%	22.85%	

	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	15 Dokumen	4,753,502,250	3 Dokumen	1,125,630,500	2 Dokumen	32,000,000	66.67%	2.84%	
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	10 Dokumen	6,209,214,032	2 Dokumen	2,406,790,000	- Dokumen	8,725,600	0.00%	0.36%	
	BAGIAN HUKUM			2,878,866,500				18,600,000			

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Poduk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	95.00%	%	2,878,866,500	90.00%	1,124,947,105		18,600,000				
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2020	Dokumen	1,043,628,000	500	Dokumen	367,989,640	155	Dokumen	18,600,000	31.00%	5.05%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	28	Kasus	1,016,949,000	6	Kasus	590,005,600	1	Kasus		16.67%	0.00%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2048	Dokumen	818,289,500	506	Dokumen	166,951,865	156	Dokumen		30.83%	0.00%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	100.00	%	45,870,725,200	100.00	%		1,586,978,346				
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				37,858,460,100				1,341,794,680				
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85.00%	%	37,063,460,550	85.00%	10,784,896,000		1,303,918,480				

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	Dokumen	709,607,500	2	Dokumen	209,988,000	1	Dokumen	20,256,400	50.00%	9.65%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	Laporan	35,294,946,800	1	Laporan	10,350,918,000	-	Laporan	1,265,591,680	0.00%	12.23%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14	Dokumen	220,003,600	14	Dokumen	223,990,000	10	Dokumen	18,070,400	71.43%	8.07%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	85.00%	%	794,999,550	85.00%		404,946,000			37,876,200		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	Dokumen	264,999,950	3	Dokumen	129,992,000	-	Dokumen	16,334,800	0.00%	12.57%

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	10	Dokumen	264,999,800	2	Dokumen	135,016,000	-	Dokumen	-	0.00%	0.00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5	Dokumen	264,999,800	1	Dokumen	139,938,000	-	Dokumen	21,541,400		15.39%	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				2,555,533,400						65,744,366			
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	100.00 %	%	2,555,533,400	95.00%		716,746,600			65,744,366			
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10	Dokumen	280,526,400	1	Dokumen	86,463,550	-	Dokumen	6,244,366	0.00%	7.22%	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10	Laporan	285,978,600	1	Laporan	79,940,000	-	Laporan	-	0.00%	0.00%	

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	1,989,028,400	2 Laporan	550,343,050	- Laporan	59,500,000	0.00%	10.81%	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			5,456,731,700				179,439,300			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	100.00 %	5,456,731,700	100.00 %	1,049,339,290		179,439,300			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Dokumen	2,424,423,000	70 Dokumen	384,358,440	47 Dokumen	7,860,000	67.14%	2.04%	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	115 Dokumen	2,284,885,000	20 Dokumen	439,974,850	37 Dokumen	160,067,000	185.00%	36.38%	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500 Orang	747,423,700	100 Orang	225,006,000	168 Orang	11,512,300	168.00%	5.12%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B	B	B	CC	B	BB	B	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten			B	B	B	BB	B	B	B	BB	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	87	88	89	85,83	86,99	88.57	89	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)			40,00	63	73	86	40,20	67,90	77.17	86	
5	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum			100%	100%	100%	100%	103,02%	92,87%	141.00%	100%	
6	Nilai LPPD			Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah (2,55)	Sangat Rendah (1,6769)	Belum Rilis	Sangat Tinggi	
7	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas			85%	85%	90%	90%	114,83%	121,95%	113.19%	90%	

8	Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang tepat sasaran			85%	85%	90%	90	100%	106,67%	170.63%	90%	
9	Persentase realisasi program perekonomian dan SDA, administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	106,46%	115,39%	175.87%	100%	
10	Persentase capaian kinerja kebijakan bidang perekonomian dan SDA			80%	80%	85%	85%	94,44%	100%	126.47%	85%	
11	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan			80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	95%	
12	Persentase pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai SOP			80%	90%	100%	100%	136,94%	161,57%	301.14%	100%	
13	Persentase realisasi tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah			100%	87%	100%	100%	100,48%	111,06%	123.44%	100%	
14	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	124.82%	100%	

15	Persentase Pelayanan administrasi tata usaha pimpinan, aparatur dan sarana prasarana			87%	89%	90%	92%	101,24%	126,60%	120.34%	92%	
16	Persentase capaian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan perangkat daerah.			100%	100%	100%	100%	102,07%	100%	107.69%	100%	
17	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan			95%	95%	95%	95%	101,89%	145,48%	145.63%	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi OPD sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian yang memadai dalam perencanaan program dan kegiatan. Sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan baik atau buruknya kinerja OPD. Jika isu tersebut berupa kelemahan / ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/ kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut akan mengakibatkan OPD dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Nunukan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dari Agen perubahan yang diselaraskan dengan Road Map Kabupaten dan Rencana Kerja OPD;
- b. Evaluasi Kelembagaan belum dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai PERMENPANRB Nomor 20 Tahun 2018 guna mewujudkan organisasi berbasis kinerja;
- c. Pemerintah Kabupaten Nunukan belum menyusun Peta Proses Bisnis di level Pemkab dan OPD;
- d. Implementasi Pengembangan Kompetensi 20 JP pada setiap pegawai belum di lakukan kepada setiap pegawai;
- e. Belum adanya pembangunan dan pengajuan unit kerja Zona Integritas, belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi akan kualitas Manajemen Resiko, serta menyusun RATL guna mendukung peningkatan kualitas implementasi SPIP di setiap OPD; serta
- f. Belum semuanya ASN menyampaikan LHKPN dan LHKASN.

2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan, diantaranya disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya reviu utamanya pada OPD dikarenakan masih terdapat kerangka logis yang belum baik antara level kepala dan level dibawahnya;
 - b. Belum adanya peta proses bisnis baik ditingkat pemerintah daerah maupun di perangkat daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja pada level perangkat daerah belum dilaksanakan dengan baik, sesuai PERMENPAN RB Nomor 88 tahun 2021;
 - d. Hasil monitoring evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan perbaikan penerapan SAKIP, termasuk belum menyertakan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi tersebut, sebagai tools dalam memantau tindak lanjut rekomendasi inspektorat;
 - e. Masih terdapatnya program dan kegiatan yang tidak secara langsung mendukung pencapaian sasaran pada masing masing perangkat daerah yang berpotensi terjadi pemborosan penggunaan anggaran belum teridentifikasi dengan baik.
3. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami beberapa kendala khususnya terhadap pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Unsur pelayanan masih mendapatkan nilai persepsi rendah dari masyarakat adalah kecepatan/waktu pelayanan;
- b. Tidak semua pimpinan unit pelayanan menganggap survey kepuasan masyarakat menjadi kegiatan prioritas sehingga tidak menjalankan survey dimaksud;
- c. Masyarakat di perbatasan pada umumnya belum terbiasa dengan pengisian kuesioner sementara petugas survey dari unit pelayanan tidak semuanya memiliki kecakapan berkomunikasi agar maksud dan tujuan survey tersampaikan dengan tepat;
- d. Beberapa Unit pelayanan publik tidak memiliki akses telekomunikasi yang baik, sehingga proses pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tidak optimal;
- e. Tidak berjalannya proses survey kepuasan masyarakat di beberapa unit pelayanan publik, dikarenakan adanya perubahan/mutasi petugas

pelaksana/penyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat.

4. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya komitmen dari Pimpinan OPD untuk memanfaatkan fasilitas sistem pengadaan barang dan jasa, diantaranya pemanfaatan E-Purchasing, Non-E-Tendering dan Non-EPurchasing dan E-Kontrak terhadap realisasi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- b. Operator/admin yang bertugas melaksanakan penginputan aplikasi SIRUP dan SPSE kurang memahami dan memiliki kompetensi yang baik di bidang pengadaan barang dan jasa;
- c. Terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi dan Kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan;
- d. Kurangnya minat dari ASN yang ada untuk menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, karena pertimbangan resiko dan insentif yang tidak sesuai dengan beban dan resiko jabatan;
- e. Masih rendahnya tingkat kematangan UKPBJ;
- f. Belum terpenuhinya standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, dimana dari 17 standar yang ada, baru terpenuhi 12 standar layanan pengadaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Nunukan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal perubahan RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal perubahan RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Riview Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2025			PAGU (Rp) TAHUN 2025			KETERANGAN
					Renja	DPA	Peruba han Renja	Renja	DPA	Perubahan Renja	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	sesudah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						78,291,429,186. 00	96,577,565,9 51	91,803,709,668	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	49,296,948,151. 00	62,336,783,9 46	54,721,725,188. 00	
I	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH						16,165,184,517. 00	19,665,184,5 17	19,665,184,517	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100% Persen	100%	100%	15,709,957,338	19,149,957,3 38	19,149,957,338	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

			sesuai pedoman	sesuai pedoman								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan	120	141	15,709,957,338	19,149,957,338	19,149,957,338	Adanya penambahan gaji PNS dan PPPK
2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95%	Persentase Pelayanan	95%	95%	455,227,179	515,227,179	515,227,179	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	2	455,227,179	515,227,179	515,227,179	
II	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN								2,349,120,085.00	2,505,998,455	2,310,800,980	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	100%	Persen	100%	100%	232,099,585	254,637,455	116,475,930	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	2	38,965,620	131,172,550	37,444,890	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	1	24,110,300	22,219,400	3,726,800	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	1	24,999,190	23,137,000	13,079,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	1	24,999,735	24,999,735	13,847,925	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1	1	24,998,400	24,998,400	15,245,440	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6	6	94,026,340	28,110,370	33,131,875	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100%	Persen	100%	100%	1,083,464,500.00	777,461,000	720,425,050	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	760	dokumen	760	760	935,582,000	704,764,400	681,474,500	Honorarium Pengelola Keuangan Setda (PA, KPA, PPK, PPK-Unit, Bendahara, Bendahara Pembantu)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	14	14	147,882,500	72,696,600	38,950,550	
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95%	Persentase Pelayanan	95%		1,033,556,000	1,473,900,000	1,473,900,000	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Paket	20	7	173,556,000	613,900,000	613,900,000	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan Bupati dan Wabup
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2	2	260,000,000	260,000,000	260,000,000	Pelayanan Kesehatan KDHWKDH beserta anggota keluarga
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2	2	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
III	BAGIAN UMUM							19,286,152,069	27,484,609,244	32,745,739,691.00	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% Persen	100%		219,999,015	119,999,260	119,999,260	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1	119,999,260	19,999,505	19,999,505	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	2 Laporan	2	2	99,999,755	99,999,755	99,999,755	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

			Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD							
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	Persen	90%		29,999,965	31,512,465	31,512,465
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	120	dokumen	120	141	29,999,965	31,512,465	31,512,465
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	92%	Persen	92%		4,681,440,373	5,299,219,138	7,089,944,085
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	7	Paket	7	8	86,171,400	105,371,400	155,371,400.00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	Paket	8	10	1,231,824,080	1,694,198,480	1,856,109,080.00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	8	Paket	8	8	293,544,958	410,820,083	867,978,250.00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36	Paket	36	36	335,636,560	354,565,800	447,771,980
											Laporan penyediaan komponen listrik pertriwulan
											pengadaan karpet ruang kerja bupati
											Pengadaan kebutuhan kepalah daerah dan wakil kepala daerah
											untuk tkebutuhan makanan Rapat

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 Paket	7	7	72,050,055	72,050,055	72,050,055	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	58 Laporan	58	58	2,574,422,320	2,574,422,320	3,602,872,320.00	kebutuhan tamu dan acara
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	8000 Dokumen	8000	2	87,791,000	87,791,000	87,791,000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5		3,404,000,000	2,881,460,000	4,661,460,000.00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit	5	5	3,404,000,000	2,881,460,000	4,661,460,000.00	penyesuaian harga Mobil jabatan KDH
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95% Persen	95%		3,011,704,000	11,034,878,040	11,331,058,040	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	800 Laporan	800	4	51,250,000	51,250,000	51,250,000	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	50	Laporan	50	50	2,960,454,000	2,960,454,000	3,265,134,000.00	Penyesuaian kenaikan harga TDL listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	45	Laporan	45	45	6.318.258.040	8,023,174,040	8,014,674,040	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persen	95%		5,330,279,266	5,549,058,141	6,279,558,141.00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	12	12	535,628,146	535,628,146	585,628,146.00	Penyesuaian kebutuhan BBM Kendaraan dinas jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84	Unit	84	84	1,394,598,370	1,394,598,370	1,494,598,370.00	Penyesuaian kebutuhan BBM Kendaraan dinas Operasional

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	220	Unit	220	85	1,922,691,500	1,871,402,500	2,121,902,500	Penyesuaian jumlah unit barang yang dipelihara
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	5	5	1,477,361,250	1,747,429,125	2,077,429,125	
7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95%	Persentase	95%		2,608,729,450	2,568,482,200	3,232,207,700.00	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	20	Paket	20	20	1,372,781,660	1,380,305,660	1,794,145,660.00	Penyesuaian kebutuhan pelayanan tamu Tamu Bupati
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	20	Paket	20	20	998,274,990	950,503,740	1,150,389,240.00	Penyesuaian kebutuhan pelayanan Tamu Wakil Bupati
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	28	Paket	28	26	237,672,800	237,672,800	287,672,800	
IV	BAGIAN ORGANISASI								1,666,955,500		1,246,608,250	
1	Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	100%	Persen	100%		1,666,955,500	1,790,788,750	1,246,608,250	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50	Dokumen	50	50	616,989,250	831,152,000	685,449,000	Penyederhanaan Birokrasi/kelembagaan dan Anjab OPD serta evaluasi kelembagaan
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	48	Laporan	48	48	299,986,750	209,685,500	107,727,500	Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik, penilaian ombudsman dan PEKPPP Menpan RB
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	Dokumen	12	2	349,988,000	349,977,000	283,064,000	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29	Dokumen	29	51	399,991,500	399,974,250	170,367,750	Pendampingan dan Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda NNK
V	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								9,829,535,980		8,230,361,480	
1	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	95%	Persen	95%		9,829,535,980	10,890,202,980	8,230,361,480	
1	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	450	Laporan	450	500	6,193,888,250	7,254,585,250	4,658,013,750	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	210	Laporan	210	230	2,885,734,230	2,885,734,230	2,885,734,230	
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	210	Laporan	210	210	749,913,500	749,883,500	686,613,500	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100%	Persentase Realisasi	100%		16,038,553,145	21,091,355,405	24,500,275,095	
VI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							1,353,428,740	1,867,530,800	1,083,673,430	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)		1,275,149,620	1,724,072,010	980,245,640	
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7	Dokumen	7	4	743,894,390	934,815,550	488,292,980	
2	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	4	Dokumen	4	4	531,255,230	789,256,460	491,952,660	Evaluasi LPPD, SPM
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	90%	Persen	90%		78,279,120	143,458,790	103,427,790	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	Dokumen	4	8	65.180.000	65,179,670	53,414,670	
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2	Dokumen	2	1	49,536,000	49,536,000	24,553,000	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Laporan	12	4	28,743,120	28,743,120	25,460,120	
VI	BAGIAN KESRA								13,560,177,300		22,635,420,750	
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	90%	Persentase	90%		13,560,177,300	18,156,303,500	22,635,420,750	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	43	Dokumen	43	50	10,027,756,800	13,507,807,500	14,509,301,750	Anggaran Hibah/Bansos Daerah (termasuk LPTQ)

2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	Dokumen	3	25	1,125,630,500	599,026,000	750,263,000	
3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	2	Dokumen	2	3	2,406,790,000	4,049,470,000	7,375,856,000	

			Trantibum Linmas.	Trantibum Linmas.							
VI II	BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM						1,124,947,105		781,180,915	
1	Fasilitas Koordinasi Hukum	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	90% Persen	90%		1,124,947,105	1,067,521,105	781,180,915	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500	500	367,989,640	367,989,640	402,562,700	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	6	6	590,005,600	578,767,600	375,332,350	
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas i	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas i	506 Dokumen	506	506	166,951,865	120,763,865	3,285,865	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	100.00%	100.00%	100.00%	12,955,927,890	13,149,426,600	12,581,709,385	
IX	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							11,189,842,000	11,420,193,570	11,402,904,905	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85% Persentase	85%	85%	10,784,896,000	11,015,248,365	11,150,503,845	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2	2	209,988,000	164,695,500	450,086,650	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1	2	10,350,918,000	10,641,418,865	10,480,418,115	SOA Angkutan Udara dan TPID
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14 Dokumen	14	35	223,990,000	209,134,000	219,999,080	tambahan kegiatan TPAKD
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	85% Persentase	85%		404,946,000	404,945,205	252,401,060	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	Dokumen	3	1	129,992,000	129,991,780	64,933,270	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dokumen	2	1	135,016,000	135,015,855	67,468,300	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan	1	Dokumen	1	1	139,938,000	139,937,570	119,999,490	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

			Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan							
X	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							716,746,600		498,273,060	
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	95% Persen	95%	95%	716,746,600	680,816,110	498,273,060	
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1	1	86,463,550	59,569,550	51,627,000	
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1	1	79,940,000	66,534,000	41,788,000	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2	2	550,343,050	554,712,560	404,858,060	
XI	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA							1,049,339,290		680,531,420	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	100%	Persen	100%	100%	1,049,339,290	1,048,416,920	680,531,420	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70	Dokumen	70	70	384,358,440	247,256,520	123,345,120	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20	Dokumen	20	20	439,974,850	517,488,000	407,687,000	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Orang	100	200	225,006,000	283,672,400	149,499,300	Peningkatan kompetensi SDM UKPBJ, Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIRUP dan SPSE bagi OPD/ Penyedia

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang di tujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nunukan, tidak ada usulan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional serta program strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Tema Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025 yaitu “mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan”. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, RKP 2025 tetap melanjutkan pelaksanaan delapan Prioritas Nasional (PN), delapan Prioritas Nasional dimaksud adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas keenam yaitu upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan

- pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.;
6. Pemerintahan baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
 7. Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.,”

Lebih lanjut, RKP 2025 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3 - 5,6 persen, tingkat kemiskinan 6 - 7 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5 - 5 persen, nilai tukar nelayan 107-110 poin, rasio gini 0,374-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan gas emisi rumah kaca 27,27 persen, dan nilai tukar petani 105-108 poin.

Arah kebijakan RKP Tahun 2025 adalah Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, Pembangunan infrastruktur berkualitas, termasuk konektivitas, transisi energi, dan pengelolaan sampah, Penciptaan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada lapangan kerja berkualitas, penurunan ketimpangan, dan produk ramah lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Nunukan memiliki Visi: “Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan, maka ditetapkan enam misi yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, mendukung dalam mewujudkan Misi Ke-4 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi”**.

Demi terwujudnya Visi Misi Kabupaten Nunukan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan memiliki Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Nunukan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatkan koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	B
			Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten	BB
			Indeks kepuasan masyarakat	89
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	86
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (4,21-5,00)
			Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	95%
			Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang tepat sasaran	90%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perekonomian, pembangunan	Persentase capaian kinerja kebijakan bidang perekonomian dan SDA	85%
			Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	95%

		dan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persentase pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai SOP	100%
		Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah sesuai pedoman nomenklatur	100%
			Persentase pelayanan administrasi tata usaha pimpinan, aparatur dan sarana prasarana	92%
			Persentase capaian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan perangkat daerah.	100%
			Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	95%

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 3406 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 19 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.
 - b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- j. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
 - k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan

- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nunukan. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada perubahan Renja tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 22 kegiatan, dan 67 sub kegiatan.

2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 91.803.709.668,- (Sembilan puluh satu milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nunukan. Ada pun Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2025

N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2025		PAGU (Rp) TAHUN 2025		SUMBER DANA	KETERANGAN
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					78,291,429,186.00	91,803,709,668		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	49,296,948,151.00	54,721,725,188.00		
I	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH					16,165,184,517.00	19,665,184,517		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100%	Persen 100%	15,709,957,338	19,149,957,338		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan	141	15,709,957,338	19,149,957,338	APBD	Adanya penambahan gaji PNS dan PPPK
2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95%	Persentase Pelayanan	95%	455,227,179	515,227,179		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	455,227,179	515,227,179	APBD	
II	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							2,349,120,085.00	2,310,800,980		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	100%	Persen	100%	232,099,585	116,475,930		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	38,965,620	37,444,890	APBD	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	24,110,300	3,726,800	APBD	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	24,999,190	13,079,000	APBD	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	24,999,735	13,847,925	APBD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1	24,998,400	15,245,440	APBD	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6	94,026,340	33,131,875	APBD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100% Persen	100%	1,083,464,500.00	720,425,050		

1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	760	dokumen	760	935,582,000	681,474,500	APBD	Honorarium Pengelola Keuangan Setda (PA,KPA,PPK, PPK-Unit, Bendahara, Bendahara Pembantu)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	14	147,882,500	38,950,550	APBD	
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95%	Persentase Pelayanan		1,033,556,000	1,473,900,000		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20	Paket	7	173,556,000	613,900,000	APBD	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan Bupati dan Wabup
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan	2	Orang	2	260,000,000	260,000,000	APBD	Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH beserta anggota keluarga

			Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah						
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	600,000,000	600,000,000	APBD
III	BAGIAN UMUM							19,286,152,069	32,745,739,691.00	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Persen		219,999,015	119,999,260	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	119,999,260	19,999,505	APBD
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2	99,999,755	99,999,755	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	Persen		29,999,965	31,512,465	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	120	dokumen	141	29,999,965	31,512,465	APBD

			Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Pegawai						
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	92%	Persen		4,681,440,373	7,089,944,085	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	7	Paket	8	86,171,400	155,371,400.00	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	Paket	10	1,231,824,080	1,856,109,080.00	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	8	Paket	8	293,544,958	867,978,250.00	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36	Paket	36	335,636,560	447,771,980	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7	Paket	7	72,050,055	72,050,055	APBD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	58	Laporan	58	2,574,422,320	3,602,872,320.00	APBD
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	8000	Dokumen	2	87,791,000	87,791,000	APBD

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Unit		3,404,000,000	4,661,460,000.00		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5	Unit	5	3,404,000,000	4,661,460,000.00	APBD	penyesuaian harga Mobil jabatan KDH
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persen		3,011,704,000	11,331,058,040		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	800	Laporan	4	51,250,000	51,250,000	APBD	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	50	Laporan	50	2,960,454,000	3,265,134,000.00	APBD	Penyesuaian kenaikan harga TDL listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	45	Laporan	45	6.318.258.040	8,014,674,040	APBD	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persen		5,330,279,266	6,279,558,141.00		

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	12	535,628,146	585,628,146.00	APBD	Penyesuaian kebutuhan BBM Kendaraan dinas jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84	Unit	84	1,394,598,370	1,494,598,370.00	APBD	Penyesuaian kebutuhan BBM Kendaraan dinas Operasional
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	220	Unit	85	1,922,691,500	2,121,902,500	APBD	Penyesuaian jumlah unit barang yang dipelihara
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	5	1,477,361,250	2,077,429,125	APBD	
7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95%	Persentase		2,608,729,450	3,232,207,700.00		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	20	Paket	20	1,372,781,660	1,794,145,660.00	APBD	Penyesuaian kebutuhan pelayanan tamu Tamu Bupati
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	20	Paket	20	998,274,990	1,150,389,240.00	APBD	Penyesuaian kebutuhan pelayanan Tamu Wakil Bupati

3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	28	Paket	26	237,672,800	287,672,800	APBD	
IV	BAGIAN ORGANISASI							1,666,955,500	1,246,608,250		
1	Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	100%	Persen		1,666,955,500	1,246,608,250		
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50	Dokumen	50	616,989,250	685,449,000	APBD	Penyederhanaan Birokrasi/kelembagaan dan Anjab OPD serta evaluasi kelembagaan
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	48	Laporan	48	299,986,750	107,727,500	APBD	Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik, penilaian ombudsman dan PEKPPP Menpan RB
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	Dokumen	2	349,988,000	283,064,000	APBD	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29	Dokumen	51	399,991,500	170,367,750	APBD	Pendampingan dan Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda NKK

V	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						9,829,535,980	8,230,361,480		
1	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	95%	Persen		9,829,535,980	8,230,361,480	
1	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	450	Laporan	500	6,193,888,250	4,658,013,750	APBD
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	210	Laporan	230	2,885,734,230	2,885,734,230	APBD
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	210	Laporan	210	749,913,500	686,613,500	APBD
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100%	Persentase Realisasi		16,038,553,145	24,500,275,095	
VI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					1,353,428,740	1,083,673,430		
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	Nilai		1,275,149,620	980,245,640	
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7	Dokumen	4	743,894,390	488,292,980	APBD
2	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	4	Dokumen	4	531,255,230	491,952,660	APBD Evaluasi LPPD, SPM

2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	90%	Persen		78,279,120	103,427,790		
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	Dokumen	8	65.180.000	53,414,670	APBD	
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2	Dokumen	1	49,536,000	24,553,000	APBD	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Laporan	4	28,743,120	25,460,120	APBD	
VII	BAGIAN KESRA							13,560,177,300	22,635,420,750		
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	90%	Persentase		13,560,177,300	22,635,420,750		
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	43	Dokumen	50	10,027,756,800	14,509,301,750	APBD	Anggaran Hibah/Bansos Daerah (termasuk LPTQ)

2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	Dokumen	25	1,125,630,500	750,263,000	APBD	
3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	2	Dokumen	3	2,406,790,000	7,375,856,000	APBD	
VII	BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM						1,124,947,105	781,180,915		

1	Fasilitas Koordinasi Hukum	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	90%	Persen		1,124,947,105	781,180,915		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500	Dokumen	500	367,989,640	402,562,700	APBD	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	6	Kasus	6	590,005,600	375,332,350	APBD	
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	506	Dokumen	506	166,951,865	3,285,865	APBD	
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	Persentase kebijakan perekonomian dan SDA serta administrasi pembangunan yang terlaksana	100.00 %		100.00 %	12,955,927,890	12,581,709,385		
IX	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA							11,189,842,000	11,402,904,905		
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85%	Persentase	85%	10,784,896,000	11,150,503,845		

1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	2	209,988,000	450,086,650	APBD	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Laporan	2	10,350,918,000	10,480,418,115	APBD	SOA Angkutan Udara dan TPID
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14	Dokumen	35	223,990,000	219,999,080	APBD	tambahan kegiatan TPAKD
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	85%	Persentase		404,946,000	252,401,060		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	Dokumen	1	129,992,000	64,933,270	APBD	

2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dokumen	1	135,016,000	67,468,300	APBD	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	Dokumen	1	139,938,000	119,999,490	APBD	
X	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							716,746,600	498,273,060		
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	95%	Persen	95%	716,746,600	498,273,060		
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1	86,463,550	51,627,000	APBD	

2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	1	79,940,000	41,788,000	APBD	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	2	550,343,050	404,858,060	APBD	
XI	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA							1,049,339,290	680,531,420		
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	100%	Persen	100%	1,049,339,290	680,531,420		
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70	Dokumen	70	384,358,440	123,345,120	APBD	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20	Dokumen	20	439,974,850	407,687,000	APBD	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Orang	200	225,006,000	149,499,300	APBD	Peningkatan kompetensi SDM UKPBJ, Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIRUP dan SPSE bagi OPD/ Penyedia

BAB V

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Kabupaten Nunukan. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan mampu mengimplementasikan profesionalismenya dengan berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.

Rencana Kerja dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pembuat keputusan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan



Ir. Jabbar, M.Si

NIP.19651001 199711 1 001